



**TRANSKRIP
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR-RI
dengan
MENTERI PERTANIAN RI
tentang**

**PENYESUAIAN RKA-K/L TAHUN 2014
SESUAI HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN
Tanggal, 21 OKTOBER 2013**



KATA PENGANTAR

Dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 Tahun Sidang 2013-2014, Komisi IV DPR-RI telah mengadakan Rapat Kerja Menteri Pertanian RI yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2013. Rapat Kerja ini membahas Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2014 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran.

Transkrip ini memuat pokok-pokok penjelasan, pertanyaan, himbauan dan saran dari anggota Komisi IV DPR-RI dan jawaban atas pertanyaan anggota Komisi IV DPR-RI.

Transkrip ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas acuan atau dokumen yang sesuai dengan tupoksi penghubung Kementerian Pertanian di DPR-RI yang terdapat pada Kegiatan Laporan Hubungan dan Kerjasama dengan MPR/DPR/DPRD/DPD dan Bakohumas.

Jakarta, 2013
Kepala Biro Umum dan Humas



Drs. Sigit Wahyudi, MM
NIP. 19610114 198202 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENGANTAR KETUA SIDANG.....	1
II. PAPARAN PEMERINTAH.....	6
III. DISKUSI.....	16
IV. JAWABAN PEMERINTAH.....	25
V. KESIMPULAN.....	28



TRANSKRIP
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR-RI
dengan
MENTERI PERTANIAN RI
tentang
PENYESUAIAN RKA-K/L TAHUN 2014
SESUAI HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN
Tanggal, 21 Oktober 2013

I. PENDAHULUAN

1. KETUA SIDANG (H.M Romahurmuziy,ST, MT/ F-PPP)

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua
Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR-RI
Yang terhormat, Menteri Pertanian, beserta jajarannya
Hadirin yang kami hormati.

Mengawali Rapat hari ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita mengadakan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI.

Bapak/Ibu yang Kami hormati,

Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR-RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR-RI tanggal 8 Juli 2013 dan keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR-RI tanggal 26 Agustus 2013 serta tanggal 16 September 2013, maka pada hari ini, Senin 21 Oktober 2013, Komisi IV DPR-RI menyelenggarakan Rapat Kerja



dengan Menteri Pertanian RI dalam rangka Penyesuaian RKA K/L Tahun 2014 sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran.

Menurut Laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR-RI telah hadir 16 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR-RI namun sesuai dengan Tata Tertib DPR-RI Pasal 245 setelah skorsing dicabut maka Rapat Kerja dapat kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

Rapat Kerja hari ini dimulai pada pukul 10.00 WIB, istirahat pukul 12.00 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 sampai pukul 15.00 WIB, apabila belum selesai dapat kita lanjutkan sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan Peraturan Tata Tertib, mengingat pukul 15.00 WIB nanti akan dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Acara Rapat hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat
2. Penjelasan Menteri Pertanian
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR-RI
4. Jawaban Menteri Pertanian atas Tanggapan Anggota Komisi IV DPR-RI
5. Kesimpulan Rapat.
6. Penutup.

Hadirin yang kami hormati,

Sesuai Surat Badan Anggaran nomor AG/10364/DPR RI/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 Perihal Penyampaian Perubahan ke 2 Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2014, bahwa Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerjanya, mengenai Penyesuaian RKA K/L TA 2014 sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran, dijadwalkan tanggal 10 – 22 Oktober 2013 dan penyampaian hasil penyesuaian RKA K/L Tahun 2014 oleh Komisi dengan Mitra kerjanya kepada Badan Anggaran secara tertulis, tanggal 22 Oktober 2013.



Selanjutnya sesuai surat Badan Anggaran Nomor AG/10656/DPR RI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013, Perihal Penyampaian hasil pembahasan RAPBN TA. 2014, menyampaikan bahwa hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga untuk Kementerian Pertanian tidak terjadi perubahan pagu, yaitu sebesar Rp 15.470.600.000.000,-.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI tanggal 5 September 2013 yang lalu telah memutuskan :

Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Definitif RAPBN Tahun 2014 Kementerian Pertanian sebesar Rp15.470.610.980.000,- sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S.258/KMK.02/2013 tanggal 17 Juli 2013 dengan perincian:

- a. Rupiah Murni sebesar Rp15.029.399.857.000,-;
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp72.826.822.000,-;
- c. Badan Layanan Umum sebesar Rp30.601.401.000,-;
- d. Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp334.320.000.000,-;
- e. Hibah Luar Negeri sebesar Rp3.462.900.000,-;

Adapun mengenai alokasi anggaran dan kegiatan per-Eselon I sebagai berikut

1. Sekretariat Jenderal sebesar	Rp.1.131.988.830.000.
2. Inspektorat Jenderal sebesar	Rp. 65.528.157.000.
3. Ditjen Tanaman Pangan sebesar	Rp.2.801.956.300.000.
4. Ditjen Hortikultura	Rp. 615.504.800.000.
5. Ditjen Perkebunan	Rp.1.500.346.530.000.
6. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp.1.643.993.743.000.
7. Ditjen PPHP	Rp.574.703.200.000.
8. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp.3.195.251.400.000.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan	Rp.1.621.445.440.000.
10. Badan PPSDM Pertanian	Rp.1.149.818.700.000.
11. Badan Ketahanan Pangan	Rp.526.184.900.000.
12. Badan Karantina Pertanian	Rp.643.888.980.000.

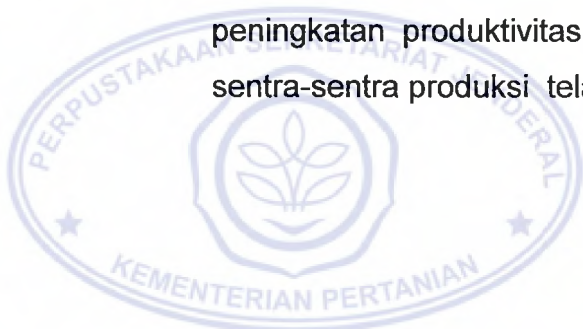


Selanjutnya pada Rapat Rerja ini Komisi IV DPR RI menanyakan kepada Pemerintah tentang evaluasi Tahun Anggaran 2013 dan tindak lanjut rencana penyaluran anggaran benih bantuan untuk Tahun Anggaran 2014. Untuk mensinkronisasi Program dengan Anggaran Belanja, maka Komisi IV DPR RI meminta penjelasan Menteri Pertanian, terutama bila ada perubahan program dibandingkan yang diajukan pada Raker terdahulu.

Selanjutnya Komisi IV meminta penjelasan berkaitan dengan realisasi Serapan Anggaran Kementerian Pertanian untuk TA. 2013 yaitu dari **Pagu Anggaran sebesar Rp 17.807.475.540.000 yang baru terserap Rp 10.462.796.798.000 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 atau 58,76 %**. Juga mohon penjelasan berkaitan target swasembada pangan yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian hingga tahun 2014 untuk realisasinya seberapa besar yang bisa dicapai.

Dalam kesempatan ini ada yang ingin Komisi IV sampaikan bahwa selama beberapa pekan terakhir Komisi IV mencatat beberapa aspirasi masyarakat yang membutuhkan kebijakan politik anggaran dewan baik melalui surat, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, maupun Kunjungan Kerja Spesifik antara lain perlunya diteruskan dukungan atas gernas kakao yang sampai saat ini belum tuntas, utamanya di daerah-daerah sentra pemberantasan OPT yang sangat berperan penting untuk menjaga tanaman yang hampir panen. Selain itu, Kami juga memnta agar Kementerian Pertanian memberikan perhatian kepada perkebunan Kopi rakyat. Berdasarkan data dari AEKI, produktivitas kopi dalam negeri masih sekitar 600-700 kg/hektar. Sedangkan Brazil bisa menembus 8 ton/hektar.

Diharapkan Indonesia bisa mencapai 1,2 ton/hektar, sehingga tingkat kesejahteraan petani kopi meningkat. Dukungan dari Kementerian Pertanian antara lain bisa berupa kegiatan revitalisasi tanaman Kopi rakyat untuk peningkatan produktivitas, mengingat rata-rata usia tanaman Kopi rakyat di sentra-sentra produksi telah mencapai 25 tahun.



Kami mendapatkan informasi hingga bulan Agustus 2013, Luas serangan OPT utama padi pada MK 2013 (April-Juni) seluas 58.249 hektar (puso,190 hektar) dibandingkan dengan luas tanam MK 2013 seluas 3.660.825 hektar, maka luas terkena serangan OPT sebesar 1,59 %, dan luas tersebut lebih rendah dibandingkan MK 2012.

Luas serangan tersebut tertinggi terkena hama tikus seluas 23.486 hektar, kemudian diikuti penggerek batang seluas 19.477 hektar. Hingga bulan Oktober, kami masih mendapatkan laporan mengenai serangan OPT pada tanaman antara lain, kasus busuk buah pada tanaman kakao sulawesi tengah khususnya tanaman kakao yang belum mendapatkan bantuan Gernas kakao, pada tanaman jeruk di Kalimantan Barat yang pada saat kami berkunjung ke sana terdapat kasus Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yaitu serangan CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration), busuk pangkal batang, Diplodia. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah/pusat dan Komisi IV DPR RI bagaimana agar tanaman jeruk khas Kalimantan Barat ini masih terus dapat dipertahankan dan produktivitasnya meningkat. Kami juga mendapatkan laporan bahwa Kabupaten Subang pada periode 1-15 September 2013, sawah di sejumlah daerah diserang hama, yaitu OPT jenis penggerek batang, wereng batang coklat (WBC), dan tikus.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Demikianlah pengantar yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala,Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati, kami persilahkan Saudara Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasannya.



II. PAPARAN PEMERINTAH

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. Suswono, MMA).

Yang terhormat,

Saudara Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI,

Para Anggota Komisi IV DPR-RI, dan

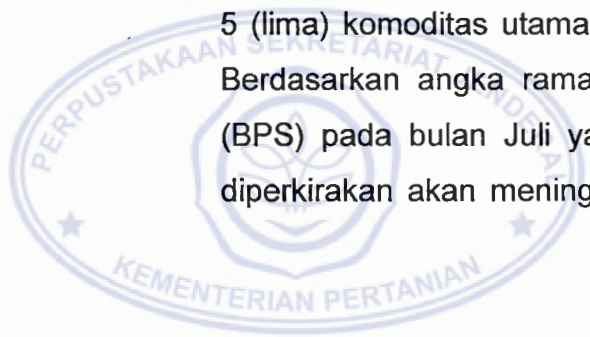
Hadirin sekalian yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Komisi IV DPR-RI atas undangan Rapat Kerja hari ini, yang mengagendakan pembahasan tentang "Penyesuaian RKA-KL sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI". Rapat yang membahas program dan anggaran pembangunan pertanian tahun 2014 ini telah dilaksanakan pada tiga kali Rapat Kerja dan tiga kali Rapat Dengar Pendapat dengan para Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil dari berbagai Rapat tersebut secara bertahap kami melakukan penyempurnaan. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas arahan dan masukan dari para Anggota Dewan yang Terhormat.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang Terhormat,

Sebelum sampai pada penyampaian RKA-KL 2014 yang merupakan materi pokok Rapat Kerja kita pada hari ini, ijinkan kami melaporkan kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2013, khususnya yang terkait dengan capaian program swasembada dan swasembada berkelanjutan, yang mencakup 5 (lima) komoditas utama yaitu: padi, jagung, kedelai, daging sapi dan tebu. Berdasarkan angka ramalan I yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juli yang lalu, produksi padi dan kedelai pada tahun ini diperkirakan akan meningkat masing-masing 0,31% dan 0,47% dibandingkan



dengan produksi tahun lalu, sedangkan untuk produksi jagung diperkirakan menurun sebesar 2,83%.

Dengan mengacu pada data tersebut, kemudian dalam tiga bulan terakhir berbagai upaya percepatan dan gerakan tanam telah dilaksanakan secara intensif di berbagai daerah untuk dapat lebih memacu peningkatan produksi. Berdasarkan hasil pembahasan dengan BPS tentang Angka Ramalan II, ada kecenderungan angka produksi ketiga komoditas tersebut pada akhir tahun dapat meningkat lebih tinggi lagi. Secara resmi dalam waktu dekat BPS akan mengeluarkan Angka Ramalan II produksi Tanaman Pangan.

Untuk gula, dengan telah memasuki masa panen raya saat sekarang ini diperkirakan produksi gula juga akan meningkat pada triwulan terakhir ini. Sementara untuk daging sapi, berdasarkan perhitungan kami, produksi pada tahun 2013 diperkirakan juga akan meningkat dibandingkan dengan tahun 2012. Perkiraan produksi 5 (lima) komoditas utama swasembada tersebut sebagaimana tampak dalam tayangan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang Terhormat,

Selanjutnya, perkenalkan kami menyampaikan kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2013 yang mencakup realisasi penyerapan anggaran APBN dan pelaksanaan fisik di lapangan. Serapan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 mencapai 58,76 %, dan relatif di atas angka rata-rata realisasi serapan anggaran secara nasional. Capaian serapan ini juga telah memperhitungkan tambahan dana dari kegiatan Direktif Presiden sebesar Rp 791,53 Milyar yang penerbitan DIPAny baru pada bulan September yang lalu. Apabila kita bandingkan dengan serapan anggaran pada posisi bulan yang sama pada tahun 2012, penyerapan anggaran Kementerian Pertanian tersebut relatif sama, namun ada sedikit peningkatan, di mana pada periode yang sama di tahun 2012 tingkat serapan APBN sebesar 57,92 %.



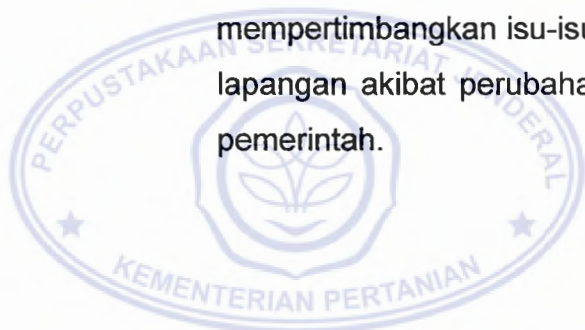
Bila realisasi serapan anggaran tersebut dipilah berdasarkan kewenangan pusat-daerah, maka realisasi anggaran tertinggi adalah pada alokasi Kantor Daerah, sedangkan berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi adalah untuk Belanja Sosial dan Belanja Pegawai.

Sejalan dengan perkembangan serapan anggaran tersebut, kami laporkan capaian realisasi fisik di lapangan tercatat sebesar 66,67%. Capaian fisik ini di lapangan adalah lebih besar dibandingkan dengan realisasi keuangan, karena sebagian kegiatan telah selesai dilaksanakan namun masih menunggu penagihan dari pihak ketiga dan penyelesaian administrasi keuangan. Dengan mempertimbangkan tingkat capaian yang ada serta perkembangan pertanaman di lapangan, maka sampai dengan akhir tahun diperkirakan serapan anggaran Kementerian Pertanian akan mencapai sekitar 94,43 %. Anggaran yang tidak terserap tersebut antara lain bersumber dari berbagai penghematan yang dilakukan dengan lebih menitikberatkan pada upaya efisiensi anggaran seperti pembatasan perjalanan dinas, efisiensi pelaksanaan pertemuan dan rapat-rapat, serta terdapat beberapa kegiatan kontraktual yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012.

Pada kesempatan ini pula kami laporkan bahwa rencana realokasi kegiatan Upsus Kedelai yang telah disetujui pada Raker yang lalu, sampai saat ini Revisi DIPAnya belum diproses di Ditjen Anggaran. Alokasi anggaran kedelai tersebut berpotensi SIAP apabila pada bulan Oktober ini revisi DIPA tidak terbit.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang Terhormat,

Dalam menyusun rancangan program dan kegiatan pada tahun 2014, selain melanjutkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya serta sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, juga mempertimbangkan isu-isu publik, masalah-masalah petani dan perkembangan lapangan akibat perubahan iklim dan lain-lain yang memerlukan penanganan pemerintah.



Walaupun pada tahun 2013 ini situasi harga pangan khususnya daging sapi, bawang merah, cabe serta kedelai mengalami gejolak, namun untuk beras dan gula memperlihatkan performa ketersediaan dan harga yang relatif aman dan stabil.

Beberapa rangkaian kebijakan terobosan telah dilakukan Pemerintah, namun situasi harga belum menunjukkan penurunan harga secara nyata. Dimungkinkan bahwa fenomena harga tinggi beberapa komoditas tersebut akibat masalah perdagangan, melemahnya nilai tukar Rupiah, kenaikan biaya angkutan dan bukan hanya masalah kelangkaan semata. Oleh karena itu dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2014 kondisi tersebut menjadi prioritas utama untuk diantisipasi. Ditengah-tengah kondisi perubahan iklim global, laju konversi lahan yang tinggi, serta krisis perekonomian global yang terjadi di berbagai belahan dunia tentunya merupakan tantangan dalam upaya mempertahankan dan mewujudkan kemandirian pangan.

Dalam tahapan kerangka pembangunan nasional, tahun 2014 mempunyai arti yang strategis karena merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Pencapaian target di tahun 2014 tersebut tidak hanya mencerminkan sukses kinerja program/kegiatan tahun berjalan melainkan juga menjadi penentu tercapai/tidaknya keberhasilan pencapaian sasaran jangka menengah 2010-2014. Selain itu, tahun 2014 juga merupakan tahun dasar yang akan menjadi *baseline* untuk perencanaan RPJMN periode 2015-2019. Hal ini mengandung arti betapa strategisnya program/kegiatan dan anggaran tahun 2014.

Sesuai agenda utama Rapat Kerja hari ini, maka kami akan menyampaikan Rencana Tahun 2014 yang merupakan konsep rancangan yang telah diperbaiki dari serangkaian pembahasan yang telah kita laksanakan sebelumnya. Untuk tahun 2014, Kementerian Pertanian mendapat alokasi pagu anggaran indikatif sebesar Rp. 15,47 triliun, yang terdiri dari: (1) Belanja Rupiah Murni sebesar Rp 15,03 triliun, (2) Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 337,78 milyar, (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar

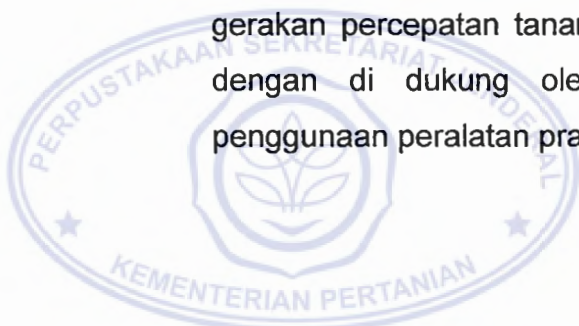


Rp 72,83 milyar, dan (4) Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 30,6 milyar. Untuk anggaran subsidi, pada tahun 2014 telah diusulkan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 21,05 trilyun, subsidi benih sebesar Rp 1,56 trilyun, anggaran kredit program Rp 15,6 trilyun dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 2,57 trilyun.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang Terhormat,

Sebagaimana arah kebijakan dan prioritas kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014, serta menindaklanjuti hasil Raker Menteri Pertanian dengan Komisi IV yang lalu, maka anggaran Kementerian Pertanian tersebut akan dipergunakan untuk membiayai program pokok sebagai berikut: (1) pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi (jagung, kedelai, tebu dan daging sapi) serta peningkatan kesejahteraan petani; (2) diversifikasi pemanfaatan energi; (3) mendukung MP3EI dan MP3KI; (4) mendukung pengembangan daerah perbatasan dan tertinggal; (5) percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat; serta (6) mitigasi/adaptasi/antisipasi bencana.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan program pencapaian swasembada pangan (padi, jagung dan kedelai), akan lebih difokuskan pada upaya perbaikan kegiatan penyediaan dan penyaluran benih unggul bermutu agar dapat lebih tepat mutu, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan petani dan waktu tanam. Demikian pula permasalahan ketersediaan dan pendistribusian pupuk yang selama ini sering dijumpai kasus keterlambatan dan kebocoran akan menjadi prioritas untuk dapat diperbaiki pelaksanaannya, terutama pengawasan mulai peningkatan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Di samping itu peran Penyuluhan Pertanian akan lebih ditingkatkan melalui peningkatan koordinasi operasional antara peneliti – penyuluh - kelompok tani di lapangan. Upaya gerakan percepatan tanam yang selama ini terbukti efektif akan ditingkatkan dengan di dukung oleh penggunaan alat mesin pertanian termasuk penggunaan peralatan pra panen dan pasca panen.



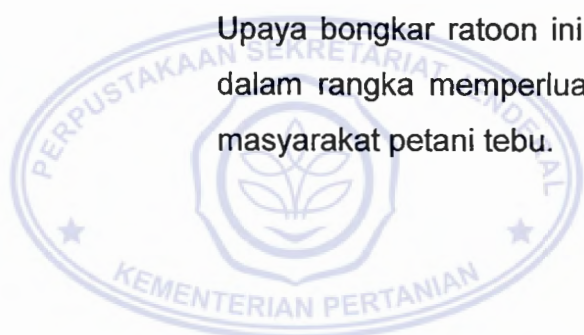
Upaya lain untuk lebih menjamin pencapaian sasaran areal tanam adalah perbaikan jaringan irigasi sehingga mampu menaikkan indeks pertanaman. Upaya optimalisasi pemanfaatan lahan suboptimal, seperti lahan rawa, lebak dan pasang surut yang potensi arealnya masih sangat luas serta teknologi sudah tersedia diharapkan akan memberikan kontribusi produksi tanaman pangan secara nyata. Upaya pencetakan sawah akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan potensi areal yang masih memungkinkan untuk dibuka. Upaya ekstensifikasi diharapkan mampu mengkompensasi konversi lahan sawah irigasi.

Di samping upaya-upaya tersebut, salah satu kunci penting untuk membantu permodalan petani dalam peningkatan produksi yang selama ini kinerjanya kami nilai masih rendah adalah penyerapan kredit program, terutama adalah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Tingkat serapan pemanfaatan ini setiap tahunnya masih rendah, sementara di sisi lain petani sangat membutuhkan modal kerja. Berbeda dengan Kredit Usaha Rakyat yang pemanfaatannya lebih baik namun untuk pemanfaatannya umumnya untuk usaha-usaha perdagangan. Diperlukan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak dalam merealisasikan pemanfaatan KKPE ini, khususnya komitmen dari pihak perbankan dan memperlunak persyaratan kelayakan kredit kepada petani.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang Terhormat,

Dalam rangka pencapaian swasembada gula, kegiatan pada tahun 2014 akan lebih ditekankan pada upaya peningkatan produktivitas, melalui pengembangan rawat ratoon serta bongkar ratoon melalui penggunaan benih unggul bermutu dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian. Kegiatan bongkar ratoon yang telah dilaksanakan selama dua tahun terakhir ini akan disempurnakan terutama pada jaminan ketersediaan bibit tebu yang bermutu. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi tebu.

Upaya bongkar ratoon ini akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka memperluas perbaikan kualitas pertanaman tebu yang dimiliki masyarakat petani tebu.



Upaya-upaya dalam mendukung pengembangan kakao yang telah dirintis melalui Gerakan Nasional (Gernas) Kakao akan terus dilanjutkan pembinaannya mengingat prospek pasar kakao, baik di dalam maupun di luar negeri sangat baik. Hal ini seiring dengan semakin bertambahnya kapasitas industri coklat baik skala kecil, menengah maupun besar di dalam negeri.

Untuk pencapaian swasembada daging, saat ini kita sudah mampu mencukupi kebutuhan semen dan pejantan unggul (*bull*). Oleh karena itu upaya intensifikasi inseminasi buatan akan terus diperluas dengan didukung oleh pengembangan pakan ternak, dan pengembangan padang penggembalaan. Dengan memanfaatkan potensi perkebunan sawit yang memiliki sumber pakan maka untuk mempercepat penambahan populasi sapi juga akan lebih dikembangkan integrasi sapi dan sawit. Upaya tersebut dilaksanakan dalam skala yang lebih luas mengingat telah dikeluarkannya Permentan No. 97 Tahun 2013 yang mengatur ijin pemasukan sapi indukan dan bibit sapi.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya muliakan,

Terkait program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA-KL Kementerian Pertanian tahun 2014 yang telah beberapa kali dibahas dengan Komisi IV DPR-RI, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat, diperoleh efisiensi rencana anggaran tahun 2014, yaitu dengan mengurangi komponen belanja yang tidak langsung berdampak pada masyarakat petani seperti antara lain: (1) Pengurangan perjalanan dinas, rapat dan workshop, (2) Pengurangan kegiatan kajian dan moratorium pengadaan kendaraan roda 4, (3) Pengurangan/realokasi dari kegiatan yang tidak langsung berkontribusi pada swasembada lima komoditas pangan utama, dan (4) Pengurangan/realokasi kegiatan yang pada pelaksanaan sebelumnya kurang berhasil.



Dari pembahasan dan telaah rencana anggaran tahun 2014 tersebut diperoleh efisiensi anggaran, yang secara kumulatif sebesar Rp 1,073 trilyun, yang kemudian diusulkan untuk kegiatan yang lebih strategis mendukung upaya pencapaian swasembada pangan. Usulan rencana pemanfaatan anggaran hasil efisiensi tersebut secara umum dikelompokkan sebagai berikut:

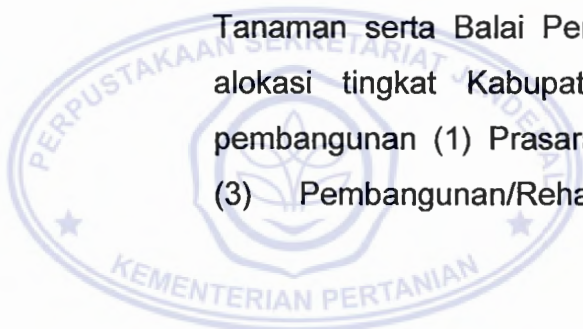
- (1) Memperluas pengembangan komoditas strategis sebesar Rp 444,0 milyar
- (2) Penambahan kegiatan pengembangan LM3 sebesar Rp 26,8 milyar,
- (3) Penambahan volume Pengembangan PUAP sebesar Rp 6,0 milyar,
- (4) Penambahan volume Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebesar Rp 34,8 milyar,
- (5) Penambahan bantuan peralatan pasca panen sebesar Rp 120,9 milyar,
- (6) Penambahan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp 134,4 milyar,
- (7) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sebesar Rp 47,9 milyar,
- (8) Penambahan bantuan peralatan dan mesin pertanian sebesar Rp 176,1 milyar,
- (9) Pengadaan peralatan laboratorium sebesar Rp 20,0 milyar,
- (10) Penyelesaian pembangunan sarana Diklat Pengembangan SDM dan Karantina pertanian sebesar Rp 20,75 milyar, dan
- (11) Pelatihan dan Pengembangan Kerjasama Internasional sebesar Rp 42,01 milyar.

Rencana alokasi penggunaan anggaran atas hasil efisiensi tersebut secara rinci dapat dilihat pada bahan yang telah kami sampaikan kepada para Anggota Komisi IV DPR-RI.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,

Selanjutnya, kami akan sampaikan rencana alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 2,58 Trilyun, yang akan dialokasikan untuk memperkuat kebutuhan sarana dan prasarana fisik dasar serta pembangunan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

Rencana alokasi anggaran DAK di tingkat Provinsi adalah untuk pembangunan/rehabilitasi/ renovasi UPTD Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman serta Balai Perbibitan dan laboratorium Kesehatan Hewan. Untuk alokasi tingkat Kabupaten/Kota, pemanfaatan DAK direncanakan pada pembangunan (1) Prasarana dan sarana air, (2) Prasarana jalan pertanian, (3) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian,



- (4) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat,
(5) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD Balai Perbenihan/perbibitan;
serta (6) Pembangunan/ Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu
dan Rumah Potong Hewan Unggas.

Berdasarkan kewenangan dalam penyusunan rencana alokasi anggaran DAK, Kementerian Pertanian menetapkan kriteria teknis yang menjadi dasar alokasi anggaran DAK. Namun penetapan alokasi anggaran akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan memperhitungkan kemampuan dan kriteria fiskal masing-masing daerah. Kriteria teknis yang diusulkan Kementerian Pertanian terdiri dari dua kategori peruntukan, yaitu (1) DAK Provinsi dan (2) DAK Kabupaten/Kota. Kriteria teknis untuk DAK Provinsi, mencakup: (1) luas penggunaan lahan (sawah irigasi dan sawah non irigasi, Tebu dan Bawang Merah), (2) populasi sapi dan kerbau, produktivitas pertanian, (3) UPTD Perbenihan Tanaman dan Proteksi Tanaman, (4) jenis Laboratorium Perbenihan Tanaman dan Proteksi Tanaman, (5) petugas pengawas benih, petugas laboratorium dan pengamat OPT, (6) UPTD Perbibitan Ternak dan Laboratorium Kesehatan Hewan, (7) jenis laboratorium kesehatan hewan, dan (8) petugas kesehatan hewan. Sementara itu, kriteria teknis DAK Kabupaten/Kota adalah: (1) luas penggunaan lahan Sawah (sawah irigasi dan sawah non irigasi), (2) Produktivitas Pertanian, (3) Jumlah Balai Penyuluh Pertanian, (4) Jumlah Penyuluh Pertanian, (5) Jumlah Penduduk Rawan Pangan, (6) Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat, (7) UPTD Perbenihan Tanaman dan Pembibitan Ternak, (8) Petugas pengawas benih, (9) Petugas laboratorium dan pengamat OPT, (10) Petugas kesehatan hewan, dan (11) Pelaporan.

Kegiatan yang di danai melalui DAK ini pemanfaatannya di arahkan untuk disinergikan dan mendukung kegiatan-kegiatan yang didanai melalui APBN (dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan), dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah Daerah.



Sebelum kami akhiri, perkenankan kami menyampaikan tentang kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2013. Kami laporkan bahwa mulai bulan Juli 2013 telah dilakukan penyesuaian pembayaran dengan menggunakan hasil audit BPK tahun 2012. Hal ini sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengurangi beban Pemerintah atas kurang bayar subsidi pupuk di tahun berikutnya. Dengan demikian kebutuhan pupuk tahun 2013 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 sebanyak 9.250.000 ton yang dihitung berdasarkan Harga Pokok Penjualan (HPP) audited BPK 2011, setelah dilakukan penyesuaian HPP audited 2012, maka volume pupuk bersubsidi untuk tahun 2013 jumlahnya berkurang menjadi 8.095.600 ton. Implikasi kekurangan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kelangkaan pupuk pada Musim Tanam Raya Oktober-Desember 2013. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan Komisi IV DPR RI agar penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2013 tetap mengacu pada perhitungan kebutuhan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012 yaitu tetap sebesar 9.250.000 ton.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan sesuai agenda Rapat Kerja kita hari ini. Kami sangat mengharapkan masukan, koreksi dan pemikiran dari Anggota Dewan yang terhormat guna lebih menjamin pencapaian sasaran dan efektifitas program pembangunan pertanian. Apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci, kami mohon perkenan agar para pejabat Eselon-I yang bersangkutan dapat diberi kesempatan untuk menjelaskan hal-hal yang lebih teknis. Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR-RI, Kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



III. DISKUSI

1. Ian Siagian (Anggota/F-PDIP)

- Mohon penjelasan berapa rupiah total pupuk bersubsidi 9,250 juta ton.
- Apakah Kementerian Pertanian masih mempunyai kemampuan untuk mencapai swasembada pangan tahun 2014.
- Mengenai dana Bansos senilai Rp. 55 trilyun yang naik mengapa justru subsidi untuk petani justru turun. Bagaimana langkah-langkah yang disediakan dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, termasuk subsidi pupuk.
- Sektor pertanian terus mengalami fluktuasi anggaran, mohon pemerintah memberi anggaran lebih kepada sektor ini.
- Apa langkah-langkah dari Kementerian Pertanian untuk menangani pengurangan anggaran yang dipotong untuk penghematan.
- Mengenai swasembada daging, dengan begitu banyak sapi betina produktif yang dipotong, kami mendukung untuk penyediaan sapi betina produktif.
- Mengenai pengontrolan berat impor sapi, saat ini sudah bebas, mohon dievaluasi lagi.

2. Hermanto, SE, MM (Anggota/F-PKS)

- Di sisa tahun 2013 ini kurang lebih tinggal 2 bulan lagi, sementara sisa realisasi 48%, mohon penjelasan apakah dalam jangka waktu dua bulan itu realisasi dapat diserap secara maksimal?
- Apakah target-target swasebada pangan untuk tahun 2014 bisa tercapai dengan jangka waktu 10 bulan di tahun 2014.
- Mengenai subsidi pupuk, karena mengalami penurunan, saya berharap kementerian tetap mempertahankan jumlah subsidi sebesar 9,250 juta ton.



3. Ir. E. Herman Khaeron, MSi (Wakil Ketua/F-PD)

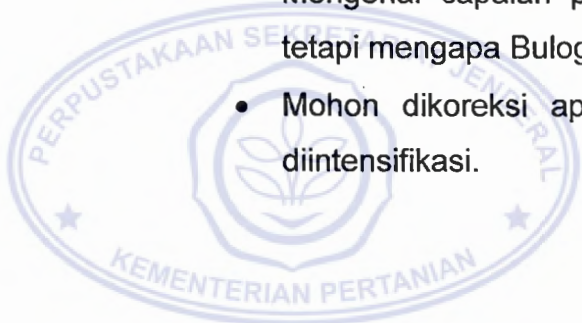
- Bagaimana ketersediaan lahan dan irigasi guna mencapai swasembada kedelai.
- Pupuk impor sangat banyak, pupuk nasional menjadi sangat bergantung terhadap subsidi, bagaimana menghadapinya.
- Bagaimana mengantisipasi gagal panen karena di anggaran Kementerian Pertanian tidak pernah muncul/ada.
- Subsidi benih semakin jauh dari harapan, petani masih kesulitan untuk mencari benih unggul. Seharusnya ada solusi dari masalah tersebut.
- Mengenai benih unggul, mengapa sangat sulit dicari.
- Mengenai Litbang, pengalokasian anggaran pada pengkajian dan percepatan terlalu besar, anggaran seperti ini harus dioptimalisasikan

4. Hj. Irna Narulita, SE, MM (Anggota/F-PPP)

- Mengenai penyerapan subsidi benih, ini hal yang sangat memprihatinkan. Mohon agar ditingkatkan kinerjanya.
- Untuk Ditjen Tanaman Pangan, mohon penjelasan mengenai penerapan teknologi jajar legowo.
- Mohon agar program penyediaan cool storage dapat diaplikasikan di wilayah Banten, agar produk hortikultura dapat selalu segar sampai ke pasar.
- Mengenai petani banyak yang gagal panen karena masalah air, bagaimana solusinya.
- Mengenai UPPO, di wilayah Banten terdapat masih banyak pemotongan, mohon penjelasan.

5. Abdul Wachid (Anggota/F-PG)

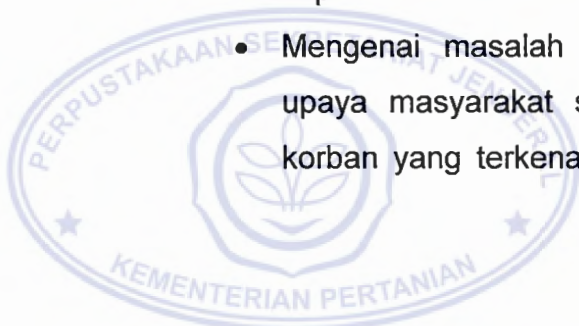
- Mengenai subsidi pupuk, mohon segera diselesaikan untuk permasalahan subsidi pupuk.
- Mengenai capaian produksi padi dari tahun 2000-2013 sudah surplus, tetapi mengapa Bulog selalu mengharapkan adanya impor beras.
- Mohon dikoreksi apakah padi dan peningkatan produksi perlu untuk diintensifikasi.



- Mengenai jagung, saya melihat dari produksi dan luasan dari tahun 2000-2013 terus menurun dan impor terus dan tidak menjadikan kita untuk swasembada. Mohon ditingkatkan.
- Mengenai kedelai, saat ini luasannya hilang hingga 300 ribu Ha, mohon penjelasan.
- Mengenai gula, saya melihat dari produksi dan luasan dari tahun 2003-2013 tidak ada kenaikan yang signifikan bahkan terus menurun, mohon penjelasan.
- Mengenai sapi, mohon penjelasan detail untuk swasembada daging berapa kuota sapi yang nanti akan diintergrasikan bekerja sama dengan lahan perkebunan baik tebu maupun lainnya tidak hanya sawit.
- Mohon penjelasan, mengenai temuan kunker, ketika berkunjung ke Jawa Timur kami menemukan ada produk pupuk organik dengan merek "Halai", sepertinya in buatan lokal tetapi tidak laku dipasaran.
- Mohon untuk masalah lainnya untuk program padi, jagung, kedelai, sapi tersebut yang kaitannya dengan Bansos, mohon dikerjasamakan terhadap pihak yang sama, karena dikhawatirkan dengan menggunakan bibit, pupuk yang tidak jelas maka mengakibatkan program-program pertanian tidak jelas.

6. Firman Soebagyo, SE, MH (Wakil Ketua/ F-PG)

- Mohon penjelasan, produksi padi, jagung dan kedelai ada kenaikan namun kenaikan tersebut masih diragukan dan kenaikan tersebut berjalan sangat lamban. Apa penyebab dari hal tersebut.
- Mengenai kesuburan lahan, mengapa kita masih mempertahankan pola lama yang menurut uji lapangan yaitu urea yang semakin menaik terus.
- Mengenai pupuk urea, sejauh ini sudah ada pupuk organik dan lain sebagainya, mengapa tidak digeser ke arah tersebut.
- Mengenai sapi, tingkat produksinya selalu surplus tetapi mengapa selalu impor.
- Mengenai masalah dukungan kepada masyarakat, harus mendukung upaya masyarakat seperti pemberantasan hama tikus. Sudah banyak korban yang terkena setrum karena memberantas hama tikus dengan



aliran listrik, hanya saja masalah tersebut belum terekspos. Bagaimana solusinya.

- Mengenai masalah persawitan, apa yang dilakukan pemerintah secara menyeluruh. Amerika bisa memberikan subsidi yang maksimal, mengapa Indonesia tidak.

7. Anton Sukartono Suratno (Anggota/F-PD)

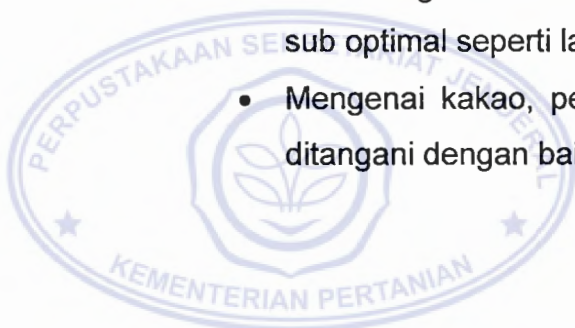
- Program pencetakan lahan dapat dikembangkan lagi, buat apa punya bibit yang unggul jika tidak ada lahan.
- Subsidi pupuk, apakah subsidi tersebut hanya untuk impor.

8. Jazilul Wahid, SQ, MA (Anggota/F-PKB)

- Program swasembada, bagaimana melakukan kegiatan bersama dengan kementerian transmigrasi.
- Masalah pupuk, apakah benar subsidi pupuk ini memberikan keuntungan bagi petani. Banyak pupuk palsu yang harus diantisipasi. Yang diharapkan dari petani dari subsidi pupuk tersebut selain pupuk, benih dan lainnya adalah mengenai masalah harga.
- Efisiensi, perlu mengeroksi efisiensi menteri kementerian pertanian.
- Undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani, yang dilakukan oleh menteri kementerian pertanian selain dari perlindungan dan pemberdayaan kepada petani apa saja

9. DR. (Hc) Ir. H. Siswono Yudo Husodo (Anggota/F-PG)

- Mohon Kementerian Pertanian melakukan tindakan untuk mengatasi kartel daging dan kedelai, karena tanpa itu Kementerian Pertanian hanya dipermainkan.
- Mohon Kementerian Pertanian menghitung ketepatan waktu tanam dan mutu benih agar diperhatikan lebih baik lagi.
- Mohon agar Kementerian Pertanian melakukan optimalisasi lahan-lahan sub optimal seperti lahan rawa lebak dan lahan pasang surut.
- Mengenai kakao, pemberantasan Penggerek Buah Kakao (PBK) mohon ditangani dengan baik dan serentak.



- Mengenai fermentasi kakao, mohon mendapatkan perhatian yang sebaik-baiknya.
- Mengenai program Kementerian Pertanian untuk memanfaatkan potensi perkebunan sawit yang memiliki sumber pakan sapi sudah tepat sekali, mohon dipertahankan.
- Mengenai program swasembada daging, mohon Kementerian Pertanian mengembangkan peternak kelas menengah.
- Mengenai penambahan UPPO sebesar Rp. 134 milyar, saya mengharapkan dengan bantuan ini mengurangi ketergantungan petani terhadap impor pupuk.

10. Ir. Marsanto, MS (Anggota/F-PDIP)

- Benih kedelai sangat terbatas, dan lahan juga sangat terbatas, mohon penjelasan apa bisa dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk menangani hal tersebut.
- Mengenai kebijakan terhadap subsidi pupuk, mohon penjelasan kenapa terus disubsidi, kapan mereka mau mandiri.
- Mohon Kementerian Pertanian membuat evaluasi dalam memsubsidi sekian milyar dengan kenaikan sekian juta ton, apakah sudahimbang atau tidak, dimana letak kesalahannya.
- Untuk Ditjen Tanaman Pangan, pada saat saya ke Kalimantan Timur, Gubernurnya mempunyai ide membuat *rice estate* 400 ribu ha, mohon Kementerian Pertanian menindaklanjuti, karena saya kira ini ide yang bagus.
- Mengenai subsidi harga pupuk di daerah perbatasan, mohon Kementerian Pertanian meninjau ulang kebijakan mengenai harga subsidi jika menilik biaya yang dibutuhkan untuk mengangkutnya.
- Mengenai upaya untuk memperbaiki kebocoran dan keterlambatan pupuk, mohon penjelasan seperti apa langkah-langkah Kementerian Pertanian untuk menanggulangnya.
- Mengenai intergrasi sapi dengan perkebunan kelapa sawit, mohon penjelasan siapa yang melaksanakan, apakah swasta atau pemerintah.

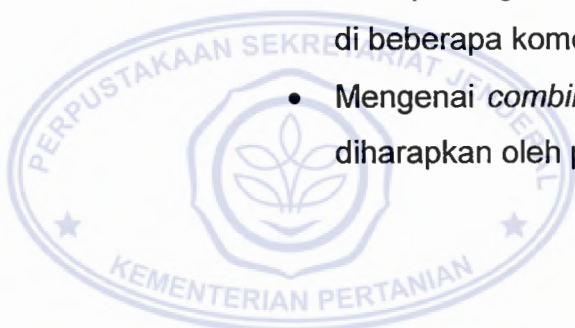


11. Hb.Ir. Nabel Al Musawwa, M.Si (Anggota/F-PKS)

- Mohon penjelasan, bagaimana koordinasi dari Menteri Pertanian dengan kementerian lain terkait program swasembada pangan terutama gula.
- Mengenai lahan, bagaimana sikap dari pemerintah daerah terkait rezim undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- Mengenai pupuk, bagaimana pupuk asing bisa masuk, mohon penjelasan.
- Koordinasi antara kementerian saling support atau tidak, mohon penjelasan.
- Perlu diberitahukan informasi mengenai hambatan-hambatan yang ada berkaitan dengan asuransi petani.
- Terkait masalah peternakan, kami akan mensupport jika impor digunakan untuk meningkatkan jumlah sapi betina yang ada didalam negeri. Tetapi jika import bertujuan untuk menguntungkan kartel, kita kurang setuju.

12. Drs. H. Ibnu Multazam (Wakil Ketua/F-PPP)

- Mohon penjelasan, bagaimana gambaran exercise tentang pupuk yang bersubsidi. Apakah volumenya berkurang dengan jumlah subsidi atau jika volumenya tetap apakah ada HET dari beberapa komponen pupuk tersebut yang harus dinaikkan.
- Mengenai subsidi benih, apa saja exercise tentang item-item pupuk bersubsidi dengan rendahnya serapan tahun 2013. Apakah ada alternatif lain atau yakin dengan anggaran Rp. 1,5 trilyun bisa terserap semua di tahun 2014 nanti.
- Berkaitan dengan efisiensi, jika memungkinkan, rencana penggunaan untuk jajar legowo dimasukkan kedalam SLPTT, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk jajar legowo bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting dan bisa langsung berdampak pada peningkatan produksi di beberapa komoditas lain.
- Mengenai *combine harvester*, untuk hal ini harus sesuai dengan yang diharapkan oleh petani.



- Mohon agar Kementerian Pertanian fokus ke alat pasca panen terhadap komoditas swasembada

13. Drs. H. A. Murady Darmasnyah (Anggota/F-Hanura)

- Masalah perعتakan sawah baru, ada 2 daerah yang mempunyai potensi bagus untuk pengembangan perluasan sawah.
- Masalah plasma yang ingin diremajakan, jika diremajakan pendapatan petani berasal darimana, lalu tanaman apa yang cocok digantikan jika diremajakan, mohon penjelasan.

14. Sudin (Anggota/F-PDIP)

- Mohon penjelasan mengenai kebijakan impor terkait dengan impor pupuk, jagung, beras dan sebagainya.
- Mengenai wacana surplus kedelai, jika itu terwujud mohon penjelasan siapa nanti yang akan membeli.
- Mengenai gernas kakao, ada 2 slot dengan jumlah anggaran yang berbeda, mohon penjelasan.
- Mengenai litbang, dengan anggaran yang besar, apakah tidak ada pengembangan yang bagus.
- Masalah peternakan, hampir Rp. 2 triliun tetapi tetap impor, tidak ada peningkatan.

15. Hj. Tety Kady Bawono (Anggota/F-PG)

- Mengenai kedelai, bagaimana perkembangan rencana pengalihan ke daerah, apakah sudah ada acc dari Kementerian Keuangan.

16. H. Sukiman, S.Pd, MM (Anggota/F-PAN)

- Perlu meningkatkan dari sisi pengawasan untuk meningkatkan tingkat produksi.
- Menyangkut kebutuhan dari Kalimantan Barat, hampir 90% bergantung pada barang ilegal yang diselundupkan. Hampir 130 kontainer sempat ditahan di daerah perbatasan. Penyelundupan yang ada yaitu



kendaraan maupun obat-obatan. Terdapat hampir 30.000 obat ditemukan di ruangan wakil karantina perikanan.

- Dari berbagai penyelundupan yang sangat merugikan, pengawasan harus lebih ditingkatkan.

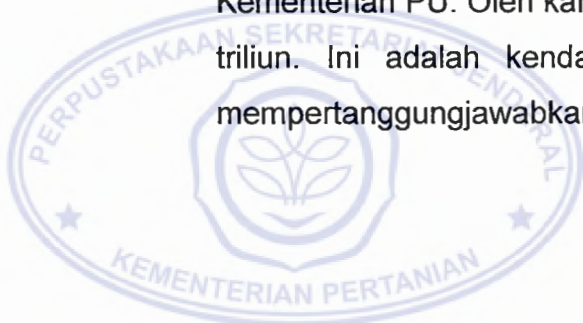
IV. JAWABAN PEMERINTAH

1. MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. Suswono, MMA)

Program swasembada ada dalam kontrak kinerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden dan ditunjang juga dengan kontrak kinerja antara menteri-menteri lain dengan Presiden. Kasus tentang upaya untuk penyediaan lahan 2 juta hektar, yang jelas-jelas ada didalam kontrak kinerja dengan kepala BPN. Disamping itu, Kementerian Pertanian siap menampung lahan 2 juta hektar untuk ekspansi lahan.

Seperti dalam kaitannya dengan swasembada gula yang harus ditunjang adalah revitalisasi pabrik gula, dimana itu bukan tugas Menteri Pertanian, tetapi tugas Menteri Perindustrian dan revitalisasi pabrik gula relatif tidak berjalan, kemudian harus ada tumbuh minimal 20 pabrik gula baru, itu pun hanya ada satu di Blora yang nampaknya memang ada prospek ke depan.

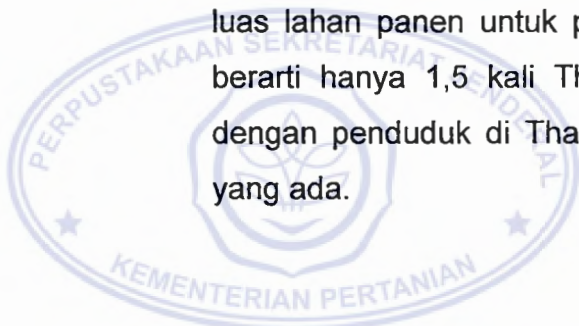
Jadi, ini adalah salah satu dari banyak persoalan yang berkaitan dengan dukungan irigasi yang mempunyai kerusakan mencapai 52% dan anggaran yang dibutuhkan Rp. 21 triliun. Kalau ini diperbaiki, akan mendorong peningkatan 3,5 juta ton, yang artinya sinergi didalam kementerian perlu diimbangi dengan sinergi di DPR antara Komisi IV dengan Komisi V, bagaimana supaya antara dukungan terhadap anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tentu saja sumberdaya air ini biasanya yang ketiga setelah jalan Jasa Marga, cipta karya, baru air. Contoh, untuk tahun ini hanya Rp. 2 triliun untuk perbaikan irigasi di Kementerian PU. Oleh karena itu, butuh waktu 10 tahun untuk sampai Rp. 18-21 triliun. Ini adalah kendala-kendala yang pada akhirnya kami yang akan mempertanggungjawabkan. Apalagi ditengah jalan tiba-tiba muncul adanya



keinginan Presiden untuk surplus 10 juta ton dan pada saat itu Presiden secara tegas mengamanatkan agar ditambahkan anggaran Rp. 3 triliun per tahun, tetapi faktanya, anggaran Rp. 3 triliun tidak muncul, bahkan sekarang dikurangi dari Rp. 17 trilyun hingga ke Rp. 15 trilyun. Pada akhir periode, tentu saja kami akan menyampaikan apa sesungguhnya kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai swasembada ini. Kami pun menyadari bahwa di Kementerian Pertanian ada faktor-faktor yang berkontribusi bagi tingkat pencapaian optimal meskipun ada faktor gesekan juga dengan faktor lain.

Persoalan sistem perbenihan, tentu saja kami akui belum kokoh antara Badan Litbang Pertanian dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang sekaligus Ketua Badan Benih Nasional, tapi fakta yang terjadi pada sistem yang sekarang berjalan, selalu dalam setiap tahun kita coba evaluasi dan kita ganti tetapi belum menjamin. Badan Litbang seharusnya fokus di benih sumber, itulah tugas Litbang. Sedangkan benih kebawahnya memang harus ada yang menangani. Sistem ini BUMN yang seharusnya bisa menjalankan peran itu, pada faktanya juga ada persoalan. Bahkan sampai pada tanggungjawab untuk benih sebar pun tidak sampai ke petani, sampai ada kasus yang sampai ke kejaksaan yaitu benih fiktif. Artinya, kami menyadari bahwa kontrol dari kami juga lemah. Ini bisa terjadi berarti karena administrasinya cukup bagus, padahal kami punya Irjen yang juga kebetulan komisaris di PT. Sang Hyang Seri. Saya juga kecewa, seharusnya komisaris disana tujuannya untuk mengawasi. Ini merupakan beberapa hal yang terus kami evaluasi.

Persoalan lahan juga kurang, contoh untuk kedelai di Brazil saja satu komoditas itu 30 juta hektar. Kita pernah mencapai swasembada ketika 1,6 juta hektar tahun 1992. Tetapi pada saat itu, harga kedelai 1,5 kali harga beras. Begitu kemudian IMF tidak memperbolehkan Bulog campur tangan, akhirnya impor masuk dan yang terjadi harga impor lebih murah kemudian petani tertekan, dan sekarang tinggal 500-600 ribu hektar saja. Kita sering membandingkan, Thailand luas lahan panen untuk padi 9 juta hektar. Indonesia hanya 13,5 juta hektar, berarti hanya 1,5 kali Thailand. Sementara penduduk Indonesia 4 kali lipat dengan penduduk di Thailand. Jadi, lahan sangat kurang, belum lagi tekanan yang ada.



Kemudian soal kebijakan impor, impor ini situasi dan kondisinya darurat. Kalau dilihat sebetulnya volume impor ini masih jauh dari produksi dalam negeri masih dibawah 10%. Misalnya untuk produk buah-buahan, setelah dikalkulasi produksi dengan impor hanya dibawah 7%. Tapi buah yang kita ekspor dengan buah yang diimpor, kita masih defisit. Jika dikalkulasi secara menyeluruh buah-buah lokal kita masih mengcover 90% lebih. Tetapi karena ini menguasai pasar di gerai-gerai pasar modern, sehingga seolah-olah kita dibanjiri impor padahal sesungguhnya tidak demikian.

Dalam kaitan beberapa komoditas seperti kedelai, memang kita masih impor lebih dari 90%. Oleh karena itu, kita bebaskan agar tidak terjadi kartel dan dengan adanya ini, bawang putih relatif murah dan terjaga. Sedangkan komoditas lain seperti daging sapi, setelah sensus 2011 dengan total jumlah sapi 16,4 juta ekor, sementara sapi potong 14,8 juta ekor, para ahli menghitung bisa mensupply sampai 2,5 juta ekor per tahun. Tetapi terdapat kendala pada transportasi, selain itu ada persoalan budaya yaitu di Jawa yang memelihara sapi untuk tabungan bukan untuk bisnis. Artinya, belum bisa dihitung stock riilnya berapa untuk mengcover kebutuhan nasional. Pada akhirnya yang berlaku adalah harga pasar, ketika harga naik otomatis supply kurang. Saat ini Kementerian Pertanian hanya dibebankan pada izin teknis yaitu rekomendasi teknis tentang kesehatan hewan.

Untuk menambah populasi soal sapi indukan, sekarang ini para importir tidak mau justru mereka ingin sapi siap potong dan sapi bakalan, padahal ini untuk menambah populasi.

2. DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN (Ir. Udhoro K. Anggoro, MS)

Perkiraan subsidi benih tahun ini maksimum 40%, untuk tahun depan dengan asumsi bisa dijalankan sejak bulan Januari totalnya sekitar Rp. 1 triliun.

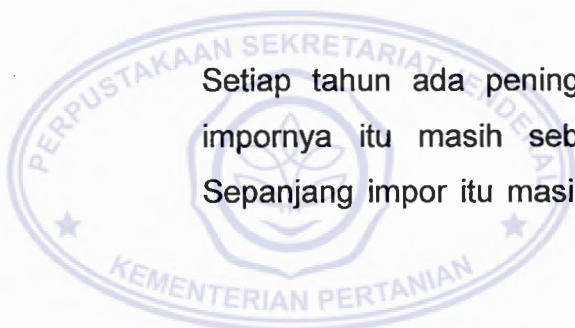


Saat ini memang sudah ada UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tetapi eksekusinya itu hanya di Kabupaten-Kota. Seharusnya ada penetapan, ini amanat UU bukan Menteri Pertanian yang menetapkan lahan ini harus dipertahankan. Kami bergantung sepenuhnya pada Bupati Walikota untuk mengeluarkan Perda. Sekarang baru ada sekitar 200 kabupaten yang sudah ada Perda, dan yang lebih memprihatinkan lagi yang sudah menetapkan itu hanya untuk mementingkan daerahnya sendiri, padahal daerah itu adalah daerah sentral pangan.

Kita ingin ekspansi, ada food estate yang beberapa sudah mempunyai potensi termasuk Kalimantan Timur. Ternyata ketika sudah diberikan izin, kemudian ingin melakukan eksekusi atau mengambil alih, ternyata tidak mudah. Ketika kami mendapatkan lahan, pasti sudah kami manfaatkan. Untuk Merauke, hanya dua perusahaan yang ingin terlibat di jagung dan tanaman pangan, yang lain tebu dan sawit. Ini harus kita selesaikan bersama, bukan hanya di pemerintahan saja kita mengutarakan itu, tapi kemudian juga kami harapkan di parlemen dan antar komisi sinkron. Seperti contoh saat ini benih, kenapa harus tender, Karena memang peraturan Menteri keuangan harus tender. Bansos itu tidak boleh lagi langsung, jadi harus melalui tender. Tender ternyata tidak serta merta langsung sekali jadi. Contoh kedelai sekarang ini 3 kali gagal. Saya juga kecewa, padahal kami Rapim setiap pekan untuk mengontrol perkembangan. Padahal benih itu ada expirednya. Ketika sudah lewat waktu juga ada musim tanam juga ada waktunya, tidak bisa kapan saja ditanam. Kami sudah mengutarakan ke Menteri Keuangan, jadi sampai sekarang kedelai tidak bisa dan dialihkan ke daerah.

Saya justru ingin menyampaikan bahwa memang untuk benih, saya kira mau tidak mau PSO. Itu yang paling aman, karena dengan PSO sudah disiapkan sejak awal dan sudah bisa ditunjuk karena ini BUMN, saya kira tidak ada masalah.

Setiap tahun ada peningkatan produksi beras, kalau dari tahun 2000 dan impornya itu masih sebetulnya batas toleransi dibawah ketentuan FAO. Sepanjang impor itu masih dibawah 10%, masih dalam kategori swasembada.

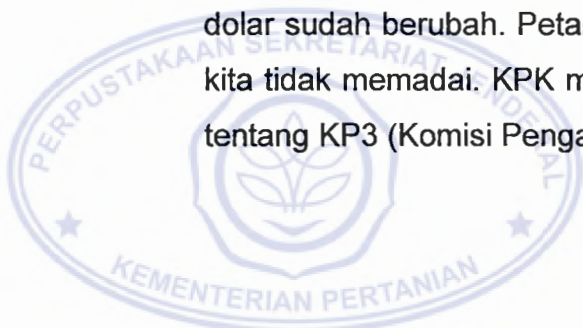


Pada tahun 1984 kita sudah mencapai swasembada, tetapi pada tahun 1985 kita sudah impor lagi. Impor ini sebenarnya ada kaitannya dengan bulog, ketika bulog tidak mampu menyerap dari produksi dalam negeri. Sebetulnya, kalau bulog menyerapnya tahun depan, bulog tidak ada impor tahun ini. Karena kalau kemungkinan misalnya menjaga stock bisa saja tahun depan baru masuk masih memungkinkan ketika kita belum panen raya. Tapi tahun ini kondisinya cukup bagus dan memungkinkan produksinya.

Untuk produksi pangan kita, dalam situasi lahan makin sempit, kita punya konversi lahan sampai 100 ribu hektar, dimana kemampuan mencetak tidak lebih dari 50 ribu hektar. Tentu saja situasi perubahan iklim yang mungkin tidak berbeda pada jaman tahun 80an ketika iklimnya jelas kapan musim hujan kapan musim kemarau. Sekarang ada musim kemarau basah.

Untuk jagung, kita prediksi tahun ini agak menurun. Tetapi sebelumnya kita naik juga hampir 2 kali lipat dibanding tahun 2000. Sedangkan kedelai, karena harganya tidak menarik untuk petani, petani akan meninggalkan sementara lahannya hanya itu yang ada. Oleh karena itu ekstensifikasi mau tidak mau harus dilakukan.

Tentang pupuk, banyak persoalan yang terjadi seperti penyelewengan dan sebagainya. Idealnya memang sebetulnya bagaimana uang Rp. 18 triliun tidak perlu diberikan ke subsidi pupuk, tetapi untuk yang lain. Tetapi persoalannya ketika kita ingin merumuskan yang lain, misalnya soal subsidi harga, ini juga bukan persoalan yang mudah. Kami berkali-kali berdiskusi mencoba merumuskan untuk subsidi harga kira-kira seperti apa mekanismenya. Sebab kalau di Jawa, penggarap tanahnya itu setiap tahun bisa berubah, dengan Rp. 18 triliun itu banyak yang bisa dilakukan termasuk irigasi, tetapi apakah petani mau subsidi pupuk ini dihapus, karena persoalannya petani masih ingin adanya subsidi pupuk. Subsidi makin membengkak karena harga gas dan nilai dolar sudah berubah. Petani ingin subsidi tetap dilakukan karena skala ekonomi kita tidak memadai. KPK merekomendasikan agar APBD membackup anggaran tentang KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida).



Kemudian soal kebijakan impor, impor ini situasi dan kondisinya darurat. Kalau dilihat sebetulnya volume impor ini masih jauh dari produksi dalam negeri masih dibawah 10%. Misalnya untuk produk buah-buahan, setelah dikalkulasi produksi dengan impor hanya dibawah 7%. Tapi buah yang kita ekspor dengan buah yang diimpor, kita masih defisit. Jika dikalkulasi secara menyeluruh buah-buah lokal kita masih mengcover 90% lebih. Tetapi karena ini menguasai pasar di gerai-gerai pasar modern, sehingga seolah-olah kita dibanjiri impor padahal sesungguhnya tidak demikian.

Dalam kaitan beberapa komoditas seperti kedelai, memang kita masih impor lebih dari 90%. Oleh karena itu, kita bebaskan agar tidak terjadi kartel dan dengan adanya ini, bawang putih relatif murah dan terjaga. Sedangkan komoditas lain seperti daging sapi, setelah sensus 2011 dengan total jumlah sapi 16,4 juta ekor, sementara sapi potong 14,8 juta ekor, para ahli menghitung bisa mensupply sampai 2,5 juta ekor per tahun. Tetapi terdapat kendala pada transportasi, selain itu ada persoalan budaya yaitu di Jawa yang memelihara sapi untuk tabungan bukan untuk bisnis. Artinya, belum bisa dihitung stock riilnya berapa untuk mengcover kebutuhan nasional. Pada akhirnya yang berlaku adalah harga pasar, ketika harga naik otomatis supply kurang. Saat ini Kementerian Pertanian hanya dibebankan pada izin teknis yaitu rekomendasi teknis tentang kesehatan hewan.

Untuk menambah populasi soal sapi indukan, sekarang ini para importir tidak mau justru mereka ingin sapi siap potong dan sapi bakalan, padahal ini untuk menambah populasi.

2. DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN (Ir. Udhoro K. Anggoro, MS)

Perkiraan subsidi benih tahun ini maksimum 40%, untuk tahun depan dengan asumsi bisa dijalankan sejak bulan Januari totalnya sekitar Rp. 1 triliun.



V. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Definitif RAPBN Tahun 2014 Kementerian Pertanian sebesar Rp. 15.470.610.980.000,- berdasarkan penyesuaian di Badan Anggaran DPR RI dengan rincian:
 - a. Rupiah Murni sebesar Rp. 15.029.399.857.000,-;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 72.826.822.000,-;
 - c. Badan Layanan Umum sebesar Rp. 30.601.401.000,-;
 - d. Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 334.320.000.000,-;
 - e. Hibah Luar Negeri sebesar Rp. 3.462.900.000,-.

Dengan alokasi anggaran per-Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 1.134.988.830.000,-;
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 65.528.157.000,-;
- c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp. 2.722.035.359.000,-;
- d. Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp. 1.566.951.421.000,-;
- e. Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp. 623.504.800.000,-;
- f. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 3.195.251.400.000,-;
- g. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebesar Rp. 592.903.200.000,-;
- h. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp. 1.643.993.743.000,-;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp. 1.601.445.440.000,-;
- j. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp. 1.149.818.700.000,-;
- k. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 526.184.900.000,-; dan
- l. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp. 648.005.030.000,-.



2. Komisi IV DPR RI menerima usulan anggaran efisiensi Kementerian Pertanian pada RAPBN Tahun 2014 sebesar Rp. 1.073.525.751.000,-, dengan pemanfaatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Komoditas;
- b. Pengembangan LM3;
- c. Penambahan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
- d. Penambahan Peralatan (Pasca Panen dan Pengolahan);
- e. Penambahan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO);
- f. Penambahan Sarana Pengendalian OPT;
- g. Peralatan dan Mesin Produksi Pertanian;
- h. Pembangunan Prasarana Diklat dan Karantina;
- i. Pelatihan dan Pengembangan Kerjasama;

Adapun rincian kriteria penerima program akan dibahas lebih lanjut.

3. Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran subsidi pupuk pada RAPBN Tahun 2014 sebesar Rp. 21.047.260.000.000,- dengan rincian:

NO	JENIS PUPUK	VOLUME (Ton)	SUBSIDI (Rp Milyar)
1	Urea	3.418.000	6,039.88
2	SP-36	760.000	2,577.20
3	ZA	800.000	1,402.87
4	NPK	2.000.000	6,899.82
5	Pupuk Organik	800.000	1,127.49
	Jumlah Subsidi	7.778.000	18,047.26
6	Kurang Bayar Tahun 2012 (Audited)		3,000.000
	Total Subsidi Tahun 2014		21,047.26



4. Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran subsidi benih pada RAPBN Tahun 2014 sebesar Rp. 1.004.355.750.000,- dengan rincian:

NO	KOMODITAS	VOLUME		JUMLAH ANGGARAN (000)
		(Kg)	(Ha)	
1	Padi Inbrida	110.625.000	4.425.000	746.718.750
2	Jagung Komposit	1.142.500	45.700	9.597.000
3	Kedelai	3.100.000	77.500	32.550.000
4	Padi Hibrida	3.000.000	200.000	151.200.000
5	Jagung Hibrida	3.214.500	214.300	64.290.000
	Total Subsidi	121.082.000	4.962.500	1.004.355.750

5. Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran subsidi sebesar Rp. 560.444.250.000,- ex pagu subsidi benih untuk belanja yang digunakan untuk program-program menopang Program Swasembada Pangan Tahun 2014 yang akan disetujui pada Rapat Kerja berikutnya.
6. Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran dan kriteria teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.579.560.000.000,- yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian target surplus beras 10 juta ton, penyediaan kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar pertanian pada kawasan pengembangan strategis nasional, penyediaan sarana dan prasarana laboratorium skala prioritas, kesiapan SDM pengelola laboratorium dan memperhatikan asas manfaat.
7. Komisi IV DPR RI, memperhatikan tidak optimalnya mekanisme penyediaan benih selama beberapa tahun anggaran, meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan terbitnya kembali Peraturan Presiden sebagai payung hukum pelaksanaan bantuan benih kepada petani pada APBN Tahun Anggaran 2014, melalui penugasan kepada BUMN.

